



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310  
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374  
www.bappenas.go.id

Nomor : 11546 /Dt.9.1/09/2020  
Lampiran : -  
Hal : Verifikasi Laporan Triwulan III TA 2020  
pada Aplikasi e-Monev Berdasarkan PP 39/2006

Jakarta, 29 September 2020

Kepada Yth.

**Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga**  
(Terlampir)

Sehubungan dengan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Kementerian/Lembaga, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu di Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan pelaporan tepat waktu melalui aplikasi e-Monev PP 39/2006 pada Triwulan II yang lalu. Bersama ini, kami sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan pelaporan dan proses verifikasi Triwulan III TA 2020 melalui Aplikasi e-Monev:

1. Bahwa pelaporan PP 39/2006 Triwulan III TA 2020 dapat dilakukan melalui Aplikasi e-Monev (<http://e-monev.bappenas.go.id>).
2. Berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan bahwa:
  - a. Penanggung Jawab Program (UKE I) bertanggung jawab untuk melakukan input data pada level: **Indikator Output Program dan Indikator Kinerja Program.**
  - b. penanggung jawab kegiatan (UKE II) bertanggung jawab untuk melakukan input data pada level: **Komponen, Output, Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator Output Kegiatan.**
  - c. Melakukan koordinasi kepada **satuan kerja** dibawahnya untuk melengkapi pelaporan level **komponen.**
3. Selanjutnya, setelah Triwulan berakhir, Kementerian/Lembaga (C.q: Biro Perencanaan) bertanggung jawab untuk melakukan **verifikasi** data yang telah dilaporkan oleh UKE II melalui Aplikasi e-Monev PP 39/2006. Masa verifikasi pada Triwulan III TA 2020 adalah **01 – 20 Oktober 2020.**
4. Panduan dan mekanisme pelaporan melalui Aplikasi e-Monev dapat diunduh pada alamat berikut: <http://tiny.cc/pedomanemonev2020>.
5. Apabila terdapat ketidaksesuaian data dan informasi pada Aplikasi e-Monev, maka dapat dilakukan perubahan dengan mengirimkan pembaharuan data kepada kami melalui Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga terkait.

Informasi lebih lanjut terkait aplikasi e-Monev dapat diperoleh dengan menghubungi kami:

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan  
Jl. Sunda Kelapa No. 9  
Telp/fax: 021-31927438  
e-mail: [laporan.pp39@bappenas.go.id](mailto:laporan.pp39@bappenas.go.id)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Sistem dan Prosedur  
Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan



**Hari Dwi Koriyanto, S.Kom., M.Si.**  
NIP. 19640908 198801 1 001

**Tembusan Yth. :**

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan

**Kepada Yth Kepala Biro Perencanaan Kementerian/Lembaga.:**

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Mahkamah Agung;
5. Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Sekretariat Negara;
7. Kementerian Dalam Negeri;
8. Kementerian Luar Negeri;
9. Kementerian Pertahanan;
10. Kementerian Hukum dan HAM;
11. Kementerian Keuangan;
12. Kementerian Pertanian;
13. Kementerian Perindustrian;
14. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Kementerian Perhubungan;
16. Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Kementerian Kesehatan;
18. Kementerian Agama;
19. Kementerian Ketenagakerjaan;
20. Kementerian Sosial;
21. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
22. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
23. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
25. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
26. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan;
27. Kementerian Pariwisata;
28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
29. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
31. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
32. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
33. Badan Intelijen Negara;
34. Badan Siber dan Sandi Negara;
35. Dewan Ketahanan Nasional;
36. Badan Pusat Statistik;
37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
38. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional;
39. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
40. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
41. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
42. Badan Pengawas Obat dan Makanan;
43. Lembaga Ketahanan Nasional;
44. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
45. Badan Narkotika Nasional;
46. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
47. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
48. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
49. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
50. Komisi Pemilihan Umum;
51. Mahkamah Konstitusi;
52. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
53. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
54. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
55. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
56. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

57. Badan Informasi Geospasial;
58. Badan Standarisasi Nasional;
59. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
60. Lembaga Administrasi Negara;
61. Arsip Nasional;
62. Badan Kepegawaian Negara;
63. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
64. Kementerian Perdagangan;
65. Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
66. Komisi Pemberantasan Korupsi;
67. Dewan Perwakilan Daerah;
68. Komisi Yudisial;
69. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
70. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
71. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
72. Badan SAR Nasional;
73. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha;
74. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu;
75. Ombudsman Republik Indonesia;
76. Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
77. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
78. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
79. Sekretariat Kabinet;
80. Badan Pengawasan Pemilihan Umum;
81. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
82. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
83. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
84. Badan Keamanan Laut;
85. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
86. Badan Ekonomi Kreatif;
87. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.